

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN MAJALENGKA JAWA BARAT**

Aziz Jakaria

NPP. 29.0634

*Asdaf Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: azizjakaria1945@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the potential for landslides in Majalengka Regency, West Java Province due to the typography of mountains and steep hills as well as the lack of participation and public awareness of potential disasters in the neighborhood where they live. Purpose:* This study aims to determine, analyze, and examine how the performance of the Regional Disaster Management Agency in dealing with landslides that often hit Majalengka Regency, West Java Province. **Methods:** This study uses a descriptive method with an inductive approach with data collection techniques using interview, observation, and documentation techniques. **Results:** In this study, the authors found that the performance of BPBD Majalengka Regency was optimal and overall was very good. The community also actively participates in disaster management. However, there are still some obstacles such as incomplete and many facilities and infrastructure in damaged condition, shortage of BPBD personnel in Majalengka Regency, disaster management in Majalengka Regency is more focused on during and after disasters so that disaster mitigation is not optimal and public awareness of potential disasters in the environment. BPBDs in improving their performance include: Increasing the quantity and quality of Majalengka Regency BPBD personnel, Increasing the number and capacity of disaster volunteers, Disaster Resilient Villages (Destana) and the Disaster Resilient Friends Program, cooperation and coordination with relevant agencies, potential and disaster reduction, planning and proposals procurement of facilities and infrastructure, increasing community participation and improving emergency response services. **Conclusion:** BPBD Majalengka Regency's performance has been very good, although with some existing obstacles. Disaster management is the obligation of all parties and there is a need for collective awareness in its implementation so that the impact can be minimized. Therefore, in addition to improving the performance of BPBDs, it is also necessary to increase public awareness and active participation to minimize the impact of disasters that can occur.

Key world: *Performance, BPBD, Disaster, Landslide*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada tingginya potensi bencana alam tanah longsor di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dikarenakan topografi

pegunungan dan perbukitan terjal serta minimnya partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana tanah longsor yang kerap melanda Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Kinerja BPBD Kabupaten Majalengka sudah optimal serta secara keseluruhan sudah sangat baik. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana. Namun masih ditemukan beberapa Hambatan seperti sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan banyak yang dalam keadaan rusak, kurangnya personil BPBD Kabupaten Majalengka, penanggulangan bencana di Kabupaten Majalengka lebih berfokus pada saat dan pasca bencana sehingga mitigasi bencana belum optimal dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di lingkungannya. Upaya BPBD dalam meningkatkan kinerjanya antara lain dengan peningkatan kuantitas dan kualitas personil BPBD Kabupaten Majalengka, peningkatan jumlah dan kapasitas relawan kebencanaan, Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Program Sahabat Tangguh Bencana, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, pengurangan potensi dan risiko bencana, perencanaan dan pengusulan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan pelayanan tanggap darurat. **Kesimpulan:** Kinerja BPBD Kabupaten Majalengka sudah sangat baik, walaupun dengan beberapa hambatan yang ada. Penanggulangan bencana merupakan kewajiban semua pihak dan perlu adanya kesadaran kolektif dalam pelaksanaannya sehingga dampak yang terjadi dapat lebih diminimalisir. Oleh sebab itu, selain peningkatan kinerja BPBD perlu juga peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat guna meminimalisir dampak bencana yang dapat terjadi.

Kata Kunci: Kinerja, BPBD, Bencana, Tanah Longsor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan potensi bencana yang tinggi, terutama bencana tanah longsor dikarenakan topografi pegunungan dan perbukitan terjal. Tentunya diperlukan kinerja yang baik dan optimal dari lembaga yang berfokus pada penanggulangan bencana. Potensi bencana yang tinggi di Kabupaten Majalengka merupakan sebuah tantangan kedepannya apabila melihat potensi perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka yang kini tengah gencar-gencarnya dilakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Kabupaten Majalengka berada pada urutan ke-7 di Provinsi Jawa Barat dan berada pada urutan ke-16 di tingkat nasional dari 497 kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan Indeks Risiko Bencana. (Tempo.co, 2015)

Kabupaten Majalengka tengah mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi maupun industri, hal tersebut terlihat dengan dibangunnya Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai bentuk usaha memecah konsentrasi kepadatan industri yang selama ini terbebani di Jakarta. Menteri Perhubungan menjelaskan dalam (Republika.co.id, 2022) bahwa Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang cukup ideal untuk

pengembangan wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan baru selain Kabupaten Karawang.

Dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati sebagai proyek strategis nasional dengan konsep *aerocity*-nya yang menjadi andalan pemerintah diharapkan dapat menjadikan daerah sekitarnya kawasan industri sebagai bentuk program nasional nawacita dalam bidang pemerataan industri dan ekonomi.

Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat terhadap penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka membentuk lembaga khusus yang menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas utamanya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka. BPBD Kabupaten Majalengka dibentuk dalam rangka penanggulangan dan mengurangi indeks risiko bencana sesuai dengan kondisi topografi wilayah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan terjal, sehingga kemungkinan terjadinya tanah longsor dan pergeseran tanah sangat tinggi. Sehingga Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat perlu adanya untuk meningkatkan penanggulangan bencana yang lebih optimal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Tanah longsor menjadi salah satu bentuk bencana alam yang seringkali melanda daerah tropis dengan intensitas hujan tinggi seperti Indonesia. Kerusakan yang disebabkan oleh tanah longsor bukan hanya kerusakan yang bersifat langsung seperti kerusakan fasilitas umum, sarana prasarana, lahan pertanian, atau korban jiwa, melainkan juga kerusakan tidak langsung yang dapat menimbulkan terganggu atau bahkan terhentinya kegiatan pembangunan dan kegiatan perekonomian daerah yang mengalami bencana dan sekitar daerah tersebut.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia dengan potensi tinggi terhadap erosi. Sekitar 22 kabupaten/kota di Jawa Barat setidaknya berpotensi mengalami pergerakan tanah dan memiliki tingkat kerawanan erosi yang tinggi, dan Kabupaten Majalengka menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kerawanan terhadap erosi tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Kabupaten Majalengka berada pada urutan ke-7 di Provinsi Jawa Barat dan berada pada urutan ke-16 di tingkat nasional dari 497 kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan Indeks Risiko Bencana.

Tahun	Tanah Longsor	Kebakaran	Angin Puting Beliung	Banjir	Sambaran Petir
2016	94	17	14	19	-
2017	49	35	18	28	8
2018	77	93	6	15	-
2019	68	22	22	16	10
2020	96	2	19	30	2

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 telah terjadi banyak sekali bencana alam yang terjadi di Kabupaten Majalengka dengan kejadian terbanyak hampir pada setiap tahunnya yaitu bencana tanah longsor. Hal tersebut disebabkan karena kondisi topografi wilayah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan terjal serta curah hujan yang tinggi apabila memasuki musim penghujan, sehingga potensi terjadinya tanah longsor dan pergeseran tanah sangat tinggi. Tingginya potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka merupakan sebuah tantangan kedepannya apabila melihat potensi perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Majalengka yang kini tengah gencar-gencarnya dilakukan. Sehingga Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat perlu adanya untuk meningkatkan penanggulangan bencana yang lebih optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks manajemen kebencanaan maupun konteks lembaga kebencanaan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penelitian yang ditulis oleh Rangga Larama pada tahun 2020 di Kota Mataram dengan judul “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok”. Menyimpulkan bahwa peran BPBD bertindak sebagai penanggung jawab dalam pembentukan kelompok di setiap desa/kelurahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Lombok mengenai kesiapsiagaan ancaman bencana, melakukan evakuasi dan penyaluran bantuan bagi korban bencana. Beberapa kendala yang dialami BPBD di Pulau Lombok adalah koordinasi lintas sektoral yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, lokasi yang besar dan kurangnya sumber daya (Larama, 2020). Penelitian yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai”, ditulis pada 2018 oleh Bakhtiar di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitiannya, Bakhtiar menarik kesimpulan bahwa peran BPBD di daerahnya sudah dapat dikategorikan baik, hal tersebut berdasarkan penjelasan masyarakat korban bencana tanah longsor yang merasakan program dan kesiapsiagaan pemerintah, sehingga kerjasama antara BPBD dan masyarakat dalam penanganan risiko tanah longsor sekarang sudah baik, termasuk dalam persiapan dan berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana (Bakhtiar, 2018). Penelitian dengan judul “Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana di Kota Medan (Studi pada kantor BPBD Kota Medan)” yang dilakukan oleh Lorensia Sitanggang pada tahun 2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas BPBD Kota Medan dinilai kurang mampu dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap penanggulangan bencana dikarenakan masih terkendala oleh kurangnya sumber daya dan anggaran. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana melalui program peningkatan kapasitas sumber daya, kompetensi, dan etika dengan menjalin kerjasama yang baik dengan instansi dan swasta, memberikan pelatihan bagi keseluruhan pegawai dan peningkatan kontrol (Sitanggang, 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu Faktor yang memengaruhi kinerja menurut Armstrong dan Baron dalam (Wibowo, 2016) serta Indikator kinerja menurut Lenvinne dalam (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2005). Konteks penelitian yang dilakukan yaitu kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka, variabel yang digunakan yaitu berbeda dengan variabel pada penelitian Rangga Larama, Bahtiar, dan Lorensia Sitanggung. Selain itu Perbedaan juga terletak pada konsep, lokasi, fokus penelitian, dan ruang lingkup.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sebagaimana Sugiyono dalam (Sugiyono, 2012) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah penelitian *postpositivistic* yang berdasarkan atas filsafat *postpositivism* yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi obyek yang ilmiah, natural dan apa adanya. Sedangkan Juliansyah dalam (Noor, 2014) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskriptifkan peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Pendekatan induktif menurut Simangunsong dalam (Simangunsong, 2015) berawal dari fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang terspesifik dan aktual, setelah itu dari fakta ataupun kejadian yang spesifik dan aktual tersebut ditarik generalisasi-generalisasi spesifik dan aktual sehingga tetap berada dalam wilayah generalisasi yang dianggap benar.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka, Sekretaris BPBD, Kabag Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabag Kedaruratan dan Logistik, Kabag Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasi-kasi dari setiap bagian masing-masing 2 orang, Anggota Pusdalops BPBD Kabupaten dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang pernah terdampak bencana sebagai objek penelitian sebanyak 5 orang). Adapun analisisnya menggunakan Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yang menyebutkan bahwa kegiatan analisis data pada penelitian kualitatif yang dilakukan secara terintegrasi dan terjadi secara kontinuitas dan berkesinambungan yang meliputi pengolahan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

Kinerja adalah sebuah hasil kerja atau pencapaian pada kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan untuk pencapaian yang telah ditetapkan tujuan dan targetnya oleh organisasi yang dilakukan pada waktu tertentu, yang dalam hal ini penulis mengambil objek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka.

Output dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Majalengka. Kualitas yang baik dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan BPBD.

Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka, tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor dan indikator-indikator yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kinerja dari BPBD Kabupaten Majalengka. Namun menurut penulis faktor dan indikator yang paling berpengaruh antara lain sebagai berikut:

- A. Faktor yang memengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Majalengka
 - a. *Personal factors*, dilihat dari kemampuan untuk berkomitmen, keterampilan dalam bekerja, tingkat motivasi, serta kompetensi yang dikuasai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka menyebutkan bahwa, personil BPBD Kabupaten Majalengka memiliki sumber daya aparatur sebanyak 74 orang yang terdiri dari ASN dan staf-staf sebanyak 23 orang, dan Pusdalops sebanyak 51 orang yang masing-masing personilnya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Anggota pusdalops Kabupaten Majalengka awalnya merupakan relawan-relawan kebencanaan dan organisasi pecinta alam dan peduli lingkungan yang memiliki jiwa kemanusiaan tinggi serta terdiri dari berbagai keahlian sehingga dalam setiap penanggulangan bencana dapat ditangani dengan baik.

BPBD Kabupaten Majalengka selalu mengagendakan acara rutin tahunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik segi pemahaman dan pengetahuan terhadap kebencanaan, kedisiplinan personil maupun kekompakan dan kerjasama tim. Selain itu setiap tahunnya juga selalu melaksanakan evaluasi baik dari kinerja organisasi maupun kinerja pegawai.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka terkait dengan *personal factors* menjelaskan bahwa:

“Disetiap akhir tahun, BPBD Kabupaten Majalengka selalu melaksanakan evaluasi tahunan. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 kemarin berada di angka 83% yang mana masuk standar cukup baik atau sangat baik itu relatif. Seharusnya kinerja mencapai angka 100% namun memang kembali lagi mengingat bahwa kami sering terkendala kekurangan personil, sarana prasarana masih jauh dari cukup, SDM yang harus selalu diupgrade sehingga melihat hambatan yang ada justru capaian yang ada sudah dirasakan baik. Hal tersebut karena apabila dilaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Bupati, BPBD sering mendapat sanjungan dan pujian langsung dari Bapak (Bupati) mengenai kinerja BPBD yang baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. dengan peningkatan kapasitas dengan adanya upgrade kualitas SDM yang dilakukan dari masing-masing personil BPBD Kabupaten Majalengka, memang dirasakan sekali peningkatan kapasitas personil BPBD.”

Berdasarkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kemampuan, keterampilan, kompetensi serta kualitas personal masing-masing anggota BPBD Kabupaten Majalengka sudah sangat baik.

b. *Leadership factors*, ditunjukkan dari seberapa baik arahan, dukungan, bimbingan, dan motivasi antara yang memimpin dan yang dipimpin.

Penulis mewawancarai salah satu personil Pusdalops BPBD Kabupaten Majalengka terkait dengan *Leadership factors* yang ada di BPBD Kabupaten Majalengka kemudian didapatkan jawaban sebagai berikut:

“Sampai sejauh ini hubungan antara pimpinan dan bawahan terbilang lancar. Hingga saat ini pimpinan sangat percaya kepada kinerja kami di lapangan yang terselesaikan dengan baik. Kalau hanya masalah kecil tentunya ada dan wajar terjadi apabila menemui masalah tentunya, namun kepemimpinan yang terjadi di BPBD Kabupaten Majalengka sudah sangat baik, pemimpin yang ada dinilai sangat bersahabat namun tetap tegas sehingga cukup dekat dengan personil BPBD yang lain.”

Penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang ada di BPBD Kabupaten Majalengka bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang baik karena dapat menempatkan diri sesuai dengan situasi yang ada. Apabila tidak terjadi bencana, pemimpin dapat menjadi seperti rekan kerja, namun apabila terjadi bencana pemimpin akan tegas namun cepat menanggapi koordinasi dari semua personil dan memberikan arahan serta motivasi. Pemimpin yang ada sering menjadi contoh dan teladan dalam kedisiplinan, sehingga bawahan-bawahan (pimpinan) pun akan meneladaninya.

c. *Team factors*, dilihat dari seberapa baik hubungan antara rekan kerja untuk saling mendukung.

Penanggulangan bencana memerlukan kerjasama tim yang baik antara personilnya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, menyebutkan bahwa dalam peningkatan kekompakan dan kerjasama tim tersebut biasanya setiap tahunnya BPBD Kabupaten Majalengka mengagendakan kegiatan rutin tahunan program kegiatan peningkatan kapasitas personil BPBD.

Kegiatan tahunan tersebut selain sebagai bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki BPBD, tetapi juga bentuk apresiasi dan reward setelah evaluasi kinerja sehingga selain bentuk kegiatan pelatihan namun juga bentuk refreshing bagi personil BPBD. Kegiatan pelatihan yang ada selain dari segi kompetensi wawasan dan pengetahuan tentang kebencanaan namun juga pelatihan yang dapat meningkatkan kerjasama tim setiap personil BPBD.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat terkait dengan *team factors* menyebutkan bahwa:

“Pegawai BPBD yang datang responnya cepat, saat laporan sudah diterima pihak BPBD hanya berselang beberapa jam petugasnya sudah datang. Dalam penanggulangan bencana yang terjadi kemarin petugasnya kompak dan berkompeten serta ramah juga kepada masyarakat. Untuk mempercepat penanggulangan masyarakat juga ikut bergotong-royong.”

Berdasarkan penjelasan dalam wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kerja tim dalam personil BPBD Kabupaten Majalengka sudah sangat baik. Hal tersebut terbentuk dari

program kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan BPBD Kabupaten Majalengka karena tentunya kekompakan tim saat kedaruratan sangat diperlukan.

d. *System factors*, didukung oleh tersedianya fasilitas sarana dan prasarana serta system kerja dalam sebuah organisasi.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka pada wawancara yang penulis lakukan terkait *system factors* menjelaskan bahwa:

“BPBD Kabupaten Majalengka masih terbilang muda apabila dibandingkan dengan BPBD Kabupaten/Kota lain sehingga memang wajar apabila sarana dan prasarana yang ada di BPBD masih kurang dan belum mencukupi. Namun, dengan adanya keterbatasan sarana prasarana kami (BPBD Kabupaten Majalengka) masih bisa mengefektifkan penggunaannya dalam penanggulangan bencana yang ada. Namun apabila terjadi bencana dengan scoop besar seperti yang terjadi pada 2 februari (2021) nampaknya memang perlu dilengkapi.”

Berdasarkan pendapat Kepala BPBD Kabupaten Majalengka tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana BPBD masih terkendala dengan jumlah. Dalam penanggulangan bencana skala kecil dinilai masih efektif, namun untuk skala bencana besar memang masih dibilang jauh dari kata cukup.

Salah satu anggota Pusdalops BPBD saat penulis wawancarai sependapat dengan pendapat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka mengenai sarana dan prasarana bahwa:

“Dengan sarana dan prasarana yang tersedia tentunya masih jauh dari kata maksimal dalam penanggulangan bencana sehingga belum begitu efektif untuk mendukung kinerja BPBD Kabupaten Majalengka. Kurangnya sarana dan prasarana serta beberapa sarana dan prasarana yang adapun tidak sedikit yang mengalami kerusakan mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat bahkan sampai tidak bisa lagi digunakan. Terkadang saat turun ke lapangan beberapa personil BPBD harus membawa peralatan milik sendiri atau meminjam kepada warga sekitar.”

Berdasarkan pendapat anggota Pusdalops BPBD tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kekurangan sarana prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Majalengka menyebabkan kurang maksimalnya penanggulangan bencana yang dilakukan terutama pada bencana dengan skala besar seperti yang disebutkan. Hal tersebut salah satunya karena sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Majalengka biasanya merupakan pengadaan awal sehingga banyak dari sarana prasarana tersebut yang mengalami kerusakan sampai tidak dapat digunakan kembali.

e. *Contextual/situational factors*, baik dilihat dari lingkungan internal dan eksternal, seberapa tinggi tingkatan perubahan dan tekanannya.

Bencana merupakan peristiwa yang dinamis dan senantiasa berubah-ubah serta tidak dapat diprediksi sehingga sangat diperlukan persiapan yang matang. Tekanan dan perubahan seringkali dirasakan personil BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.

Menurut Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Majalengka, dalam wawancara yang penulis lakukan mengatakan bahwa dalam kebencanaan memang selalu berubah namun membentuk seperti pola-pola tertentu sehingga sering muncul istilah bencana tahunan. Misal

ada bencana yang memang terjadi setiap tahunnya, ada bencana yang muncul setiap lima tahun sekali dan periode lainnya tergantung kepada bencana tersebut.

Strategi, khususnya pada Seksi Kedaruratan sendiri yang memang tim yang terjun langsung pada titik bencana saat bencana terjadi biasanya akan melihat dan mempelajari grafik kebencanaan tahun-tahun sebelumnya, minimal lima tahun sebelumnya. Sehingga untuk penanggulangan bencana yang dilakukan biasanya berprinsip untuk mempersiapkan yang terburuk, namun mengharapkan yang terbaik. Sedangkan internalnya sendiri dari aspek anggaran apabila ketersediaannya tiba-tiba mengalami perubahan seperti halnya pada pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat pandemi sehingga anggaran yang tersedia dialihfungsikan kepada penanganan pandemi. Selain itu dalam pencapaian target kinerja tentunya personil akan bekerja dalam tekanan baik dari pimpinan maupun dari masyarakat yang terdampak bencana.

B. Indikator kinerja BPBD Kabupaten Majalengka

a. *Responsiveness*

Responsiveness atau responsivitas adalah kapasitas suatu organisasi dalam menyikapi terhadap perubahan dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kesesuaian antara pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat serta berpengaruh tidaknya pelaksanaan penanggulangan bencana tanah longsor terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Kepala Seksi Pencegahan saat penulis wawancarai menyebutkan bahwa di lapangan seringkali adanya perbedaan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat pun tentunya berbeda-beda tergantung wilayah dan kebencanaannya, sehingga BPBD Kabupaten Majalengka memerlukan kemampuan untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Pegawai BPBD Kabupaten Majalengka saat pemberian bantuan atau kebutuhan saat pasca bencana akan berkomunikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan atau tidak dilayani dengan baik.

Menurut Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada saat diwawancarai menjelaskan bahwa dengan terjadinya kebencanaan selain pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan biasanya sekaligus pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan terjadinya kebencanaan tersebut merupakan sebuah dampak apabila mitigasi bencana tidak dilakukan, sehingga secara tidak langsung menyadarkan masyarakat bahwa mitigasi bencana sebagai bentuk upaya pengurangan risiko bencana sangatlah penting. Terutama untuk penanggulangan bencana mengalami perubahan paradigma untuk menjadikan mitigasi kebencanaan sebagai ujung tombak yang didahulukan.

BPBD Kabupaten Majalengka sering sekali memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai pentingnya mitigasi kebencanaan, namun biasanya masyarakat baru akan sadar apabila bencana sudah terjadi. Sehingga dengan terjadinya bencana tersebut secara langsung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Melihat informasi yang didapatkan dari narasumber wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa BPBD selalu mencoba untuk memenuhi keinginan dari masyarakat sebagai korban terdampak bencana, namun tetap melihat skala prioritas dari kebutuhan paling mendesak dari kondisi masyarakat di lapangan. Hal tersebut disebabkan adanya kekurangan dari sarana dan prasarana serta logistik yang tersedia. Menghadapi hal tersebut, BPBD Kabupaten

Majalengka akan mengkomunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti keadaan dilapangan.

b. Responsibility

Responsibility atau tanggung jawab adalah sebuah penjelasan mengenai pengukuran kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan dengan prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Dalam hal ini kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan pedoman dan dasar hukum.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait dengan tanggung jawab menyebutkan bahwa:

“Selain Standar Operasional Prosedur (SOP), sebelum pelaksanaan penanggulangan bencana tetap berkoordinasi dengan pimpinan untuk meminta arahan. Sedangkan untuk bagian seperti bagian kedaruratan dan logistik yang terjun ke titik bencana saat terjadinya bencana dan menuntut kecepatan respon biasanya dapat langsung bergerak tanpa instruksi sebelumnya selama tidak berlawanan dengan SOP yang berlaku.”

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada saat kebencanaan dan keadaan darurat tentunya harus selalu cepat, tepat dan sigap sehingga sangat diperlukan SOP dalam setiap pelaksanaannya. Namun terkadang pada saat penanggulangan bencana sering dituntut dengan segala perubahan yang dapat terjadi dan tidak terduga sehingga ada fleksibilitas dalam penanggulangan bencana. Personil selalu standby dan apabila suatu bencana terjadi maka tanpa perlu adanya arahan langsung dari pimpinan dapat langsung bergerak mengikuti SOP yang telah tersedia.

c. Accountability

Accountability atau akuntabilitas menunjukkan kesesuaian penyelenggaraan kebijakan/program/kegiatan dengan peraturan yang berlaku, yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan nilai dan norma di masyarakat.

Kabupaten Majalengka terdiri dari 2 bagian wilayah, yaitu wilayah bagian utara dan bagian selatan yang bukan hanya perbedaan bentang alam namun juga tentang nilai dan norma antara keduanya. Masyarakat wilayah selatan dalam bertutur kata lebih halus dibandingkan dengan masyarakat wilayah utara, masyarakat wilayah selatan juga cenderung lebih berpartisipasi aktif serta memiliki kepedulian lebih tinggi apabila dibandingkan masyarakat wilayah utara yang lebih individualis. Pada saat terjadinya bencana, masyarakat wilayah selatan akan berpartisipasi aktif dan bergotong-royong dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut justru berbeda dengan penanggulangan bencana di wilayah utara dimana masyarakatnya cenderung acuh tak acuh.

Melihat hal tersebut, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Kepala Seksi Rekonstruksi pada saat diwawancarai menjelaskan bahwa:

“Dalam proses penanggulangan bencana tentunya mengharuskan untuk berhadapan dengan masyarakat langsung. Untuk berkomunikasi dengan masyarakat tersebut tentunya sebelumnya perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah setempat untuk mengetahui watak serta latar belakang dari masyarakat sekitar, sehingga komunikasi yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar melalui pendekatan yang tepat.”

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka pada saat wawancara menyebutkan bahwa apabila dikaitkan dengan nilai dan norma masyarakat terutama dalam hal adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut, justru terdapat kesesuaian antara mitigasi bencana dengan adat istiadat yang berlaku. Misal masyarakat di suatu wilayah terdapat larangan untuk membangun bangunan permanen seperti penggunaan batu bata dan semen sehingga hanya diperbolehkan menggunakan kayu, atau di suatu wilayah dilarang adanya bangunan yang melebihi tinggi tertentu. Ternyata hal tersebut juga sejalan dengan peta kebencanaan yang mana wilayah tersebut memang memiliki tanah yang tidak stabil sehingga pembangunan dengan bangunan permanen atau terlalu tinggi justru rawan terjadinya tanah longsor. Melihat hal tersebut maka adanya keselarasan antara mitigasi bencana dan nilai dan norma masyarakat pada beberapa wilayah tertentu sehingga justru dengan adanya nilai dan norma tersebut secara tidak langsung mendukung terhadap pelaksanaan mitigasi bencana.

Tingkat kualitas layanan tidak dapat ditentukan dari perspektif perusahaan, tetapi harus ditentukan dari perspektif pelanggan. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi dan program pelayanan, perusahaan perlu memperhatikan faktor kualitas pelayanan dan bekerja sama dengan komunitas pelanggan. Kualitas pelayanan diakui oleh masyarakat.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang terdampak bencana yang menyebutkan bahwa:

“BPBD Kabupaten Majalengka menurut pendapat ibu sudah baik terkait kinerjanya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tanah longsor, baik saat kejadian maupun setelah bencana. BPBD Kabupaten Majalengka bergotong royong dengan masyarakat dan pemerintah desa lainnya untuk menyingkirkan tanah bekas longsor yang menimpa rumah. Saat kejadian ibu sekeluarga langsung dievakuasi menuju rumah kerabat yang dirasa aman. Diberikan juga bantuan logistic seperti makanan, minuman, selimut bahkan perlengkapan sekolah anak karena tau anak-anak masih usia anak sekolah, ada juga pemberian mainan untuk anak-anak karena mungkin sekali menyebabkan trauma pada anak-anak. Menurut ibu pergerakan BPBD juga cukup cepat, saat sudah dilaporkan BPBD cepat datang walaupun lokasi rumah ibu dengan kantor BPBD cukup jauh.”

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Majalengka dalam (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka, 2021), BPBD Kabupaten Majalengka menyebutkan bahwa:

“Prosentase Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sehingga tersusunnya dokumen kajian risiko bencana (KRB) dan terselenggarannya penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana atas target tersebut telah tercapai 100%. Prosentase Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sehingga terbentuknya desa Tangguh bencana, terlaksanannya operasi hingga penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, tertanganannya seluruh masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat bencana, terselenggarannya sosialisasi penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan kesiapsiagaan, tersediannya brojong kawat, adanya anggota PUSDALOPS-PB yang mempunyai sertifikat keahlian dan terlaksananya penanganan pencarian dan penyelamatan korban pertolongan darurat evakuasi bencana. atas target tersebut telah tercapai dari 80 % hingga 100 %. Prosentase Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sehingga terlaksananya penanganan kejadian dan korban dalam penanggulangan bencana dan adanya pengadaan bantuan logistik penanganan

bencana, terpenuhinya logistic bagi tim penyelamatan hingga evakuasi korban bencana dan terpenuhinya semua kebutuhan pokok untuk penanggulangan bencana atas target tersebut telah tercapai 65 % dari 100%.”

Hal tersebut menyimpulkan bahwa Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka dapat dikatakan sudah baik namun belum optimal. Kualitas produktivitas yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka berjalan dengan baik dan telah dilakukan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, kreatifitas, serta pengetahuan pegawai.

3.2. Hambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Majalengka dalam wawancara penulis lakukan apabila terjadinya bencana terutama bencana dengan skala menengah apalagi sampai bencana skala besar, dalam penanggulangan bencana terutama bencana tanah longsor yang dilakukan BPBD kerap kali mengalami beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia BPBD Kabupaten Majalengka sehingga tidak sebanding dengan pelaksanaan tugas pada saat situasi darurat.

Dengan jumlah tersebut BPBD masih efektif dalam penanggulangan bencana apabila skala yang terjadi masih dalam skala ringan sampai sedang, namun baru akan terasa kewalahan apabila bencana sudah memasuki skala sedang sampai berat. Saat terjadinya bencana dengan kurangnya personil dalam bertugas maka dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan yang tidak tepat waktu. Baik laporan masalah keuangan, kebencanaan, maupun kepegawaian. Namun semua apa yang diminta untuk laporan, BPBD Kabupaten Majalengka melaksanakan sesuai dengan permintaan. Berhubung kurangnya personil BPBD maka dapat memperlambat pekerjaan sesuai bidangnya masing masing.

- b. Kurangnya mitigasi kebencanaan sebelum terjadinya bencana.

Bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, gerakan tanah, gunung meletus atau bencana alam lainnya tentunya terjadi secara mendadak dan sulit untuk diprediksi sebelumnya. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut perlu untuk mengadakan kegiatan mitigasi bencana, yaitu dengan melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalisir dampak dari adanya bencana baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Dengan minimnya tahapan mitigasi bencana terutama pada daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, justru akan menyebabkan sebuah bencana memberikan dampak yang besar.

- c. Sarana dan Prasarana yang terbatas

Sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Majalengka tidak sedikit jumlahnya yang mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan dan berat bahkan hingga tidak dapat digunakan kembali. Beberapa sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan ringan bahkan masih tetap digunakan. Namun apabila memang sarana dan prasarana yang ada mengalami kerusakan berat maka tentunya tidak bisa digunakan kembali sehingga hal

tersebut merupakan salah satu kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Majalengka. menyebabkan penanggulangan bencana yang dilakukan tidak maksimal dan kurang efektif.

- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya.

Kondisi tanah seperti lereng dan sekitarnya, terutama dengan tidak adanya pohon berkayu keras tentunya menjadi daerah yang rawan bencana sehingga seharusnya tidak boleh dihuni dan dijadikan sebagai pemukiman maupun perumahan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda apabila terjadi bencana. Namun kebanyakan masyarakat beranggapan hal tersebut bukan masalah besar bahkan menganggap baik-baik saja karena merasa sudah tinggal di tempat tersebut untuk waktu yang lama sehingga sudah merasa aman dan nyaman.

Pihak BPBD Kabupaten Majalengka sendiri sudah sering mengingatkan bahwa wilayah yang dihuni tersebut apabila dilihat dari peta potensi bencana berada pada wilayah zona merah yang artinya tanah tersebut tidak boleh dihuni untuk pemukiman. Karena apabila sudah masuk pada musim hujan maka tanah yang dipakai bisa saja tidak kuat menahan beban apa lagi dengan bangunan-bangunan yang permanen seperti tembok yang mudah sekali dapat menyebabkan tanah bergerak dan menyebabkan longsor.

3.3. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Terkait Peningkatan Kinerja dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beberapa hal yang dilakukan BPBD Kabupaten Majalengka dalam upaya peningkatan Kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja personil BPBD Kabupaten Majalengka
Dalam peningkatan kualitas kerja BPBD Kabupaten Majalengka mengikuti beberapa diklat dari BPBD provinsi dan pelatihan gabungan bersama instansi terkait. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan kebencanaan bagi personil anggota BPBD Kabupaten Majalengka memang merupakan agenda rutin tahunan, yang pelaksanaannya minimal dua kali dalam setahun. Selain sebagai peningkatan kualitas personil, kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk peningkatan kerjasama tim dan kekompakan antara personil BPBD dikarenakan pentingnya kerjasama yang baik dalam penanggulangan bencana.

- b. Peningkatan jumlah dan kapasitas relawan serta Destana

Setiap tahun BPBD rutin mengadakan pertemuan, pembinaan teknis sehingga terus menanamkan jiwa sosial dan kemanusiaan terhadap masyarakat khususnya yang peduli terhadap kebencanaan dan sekaligus menjadi wadah aspirasi-aspirasi setiap anggotanya.

Peningkatan kapasitas relawan BPBD juga dilakukan dengan cara pembentukan desa dengan kemampuan untuk beradaptasi dan mandiri terhadap dampak serta potensi bencana di wilayah desa tersebut, serta diharapkan apabila terjadi bencana sekalipun desa tersebut dapat pulih dengan cepat. Program tersebut dinamakan Desa Tangguh Bencana (Destana). Hal ini bertujuan agar masyarakat desa yang merupakan bagian terkecil dari suatu negara memiliki partisipasi aktif terhadap penanggulangan bencana, memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar.

Selain pembentukan Destana, peningkatan kapasitas relawan BPBD juga dilakukan terhadap relawan kebencanaan sejak usia dini yaitu usia sekolah mulai dari pelajar SD, SMP dan SMA sederajat. Program BPBD Kabupaten Majalengka tersebut dinamakan program Sahabat Tangguh Bencana. Perwakilan dari setiap sekolah SD, SMP, SMA dan sederajat di wilayah Kabupaten Majalengka akan diberikan sosialisasi, simulasi dan demonstrasi terkait pemahaman kebencanaan, dampak bencana dan hal apa yang perlu dilakukan apabila terjadinya bencana. sehingga hal yang berkaitan dengan kebencanaan serta pengurangan risiko bencana telah ditanamkan sejak usia dini.

Relawan-relawan tersebut dibentuk dan diberikan pelatihan khusus seperti penyuluhan, sosialisasi dan simulasi kebencanaan sehingga masyarakat dapat mandiri terutama dalam penanganan terhadap bencana seperti pemberian pertolongan serta mengetahui apa yang perlu dilakukan apabila terjadinya bencana.

c. Bekerjasama serta koordinasi dengan instansi terkait

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa penanganan bencana memerlukan koordinasi dengan otoritas kelembagaan penanggulangan bencana eksternal dengan instansi terkait. Koordinasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal bekerjasama dengan lembaga/lembaga lain yang memiliki fungsi yang sama. BPBD Kabupaten Majalengka dalam hal ini menjalankan fungsi komando dan koordinator lapangan dapat berkoordinasi horizontal dengan instansi terkait sehingga dapat meminimalisir dampak negatif terjadinya bencana.

d. Upaya mengurangi potensi dan risiko bencana di Kabupaten Majalengka

Beberapa usaha yang BPBD Kabupaten Majalengka lakukan untuk mengurangi potensi bencana. antara lain sebagai berikut

- Gerakan penanaman tanaman berkayu keras pada sejumlah titik dengan lahan miring yang terjal serta pembuatan terasering pada titik-titik dengan kerawanan
- Membangun sistim pengairan yang baik di lereng sehingga air di lereng dapat dengan mudah dialirkan dari lereng.
- Penambahan penahan gerakan tanah lereng berupa bronjong.

Sedangkan dalam mengurangi risiko bencana, ada beberapa hal yang BPBD Kabupaten Majalengka dapat lakukan, antara lain sebagai berikut:

- Pemetaan daerah rawan bencana longsor, sebagai dasar pelaksanaan program mitigasi risiko bencana dan penyadaran masyarakat oleh pemerintah
- Pelaksanaan program-program dalam rangka mendukung mitigasi bencana. seperti pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, pengarahan serta simulasi kebencanaan pada masyarakat terkait peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang mitigasi bencana. Instrumen ini sangat penting agar warga bersiap sejak awal sebelum terjadinya bencana.

e. Membuat perencanaan atau mengusulkan Pengadaan Sarana dan Prasarana serta anggaran sarana dan prasarana tersebut untuk melaksanakan penanganan kebencanaan.

f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan badan penanggulangan bencana daerah yang berbentuk desa. Desa tahan bencana (Destana) adalah desa yang mampu beradaptasi dan merespon secara mandiri terhadap ancaman bencana dan cepat pulih dari dampak buruk suatu bencana (Perka BNPB No.1 Tahun 2012). Untuk melaksanakan program desa tahan bencana, diperlukan seorang fasilitator sebagai pendamping masyarakat selama proses kegiatan.

g. Peningkatan pelayanan tanggap darurat terhadap masyarakat
BPBD Kabupaten Majalengka memiliki Hotline yang menerima seluruh pelaporan selama 24 jam penuh dan selalu on call/quick respon non stop. Apabila terjadi kebencanaan masyarakat dapat melapor pada nomor 0823-4040-0300 melalui panggilan telepon langsung maupun whatsapp untuk memudahkan laporan dari masyarakat. Nomor tersebut biasanya akan diberikan pada masyarakat secara langsung apabila sedang pelaksanaan peningkatan pengetahuan di masyarakat seperti sosialisasi dan penyuluhan. Nomor tersebut juga tersedia di website resmi BPBD Kabupaten Majalengka.

BPBD Kabupaten Majalengka juga memiliki akun resmi di media-media sosial yang fungsinya selain digunakan sebagai pelaporan kebencanaan namun juga penyampaian-penyampaian informasi terkait kebencanaan sehingga informasi seperti kejadian bencana, informasi laporan dan prakiraan cuaca, peta wilayah kebencanaan atau informasi kebencanaan lainnya dapat langsung diterima masyarakat dari berbagai kalangan usia.

Pada saat terjadi bencana dan BPBD Kabupaten Majalengka mendapat laporan, maka akan dengan segera petugas yang piket langsung melakukan tindakan awal ke lokasi untuk kemudian mendata dan pengecekan terhadap kebencanaan sehingga didapat gambaran awal kebencanaan untuk selanjutnya dikordinasikan kepada pimpinan dan menjadi dasar dalam penentuan keputusan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat terhadap potensi bencana dan penanggulangan terhadap suatu bencana. Pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan BPBD terkait penanggulangan bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Majalengka didalamnya juga terdapat bentuk preventif dalam paradigma baru penanggulangan bencana nasional.

Penulis menemukan temuan penting yaitu penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara sehingga perlu juga partisipasi aktif masyarakat yang terlibat serta diperlukanya koordinasi mengingat koordinasi atau komunikasi merupakan ujung tombak dalam penanggulangan bencana (Larama, 2020). Peran pemerintah dalam menanggulangi bencana alam merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu system yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Namun masyarakat juga memiliki

hal penting dalam berpartisipasi untuk memberdayakan kehidupannya. Agar rasa dan antisipasi masyarakat rawan berdampak resiko bencana (Bakhtiar, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kinerja BPBD Kabupaten Majalengka dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor telah cukup baik namun belum cukup maksimal. Sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Majalengka, peran BPBD Kabupaten Majalengka sangat dibutuhkan. Namun, karena beberapa hambatan yang ada seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD Kabupaten Majalengka, terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran dari pemerintah kabupaten kepada BPBD Kabupaten Majalengka, maka tugas dan fungsi BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana juga terbatas dan sesuai dengan stok yang dibutuhkan (Sitanggang, 2017). Namun, penerapan digitalisasi mengingat di era modern ini setiap kegiatan sudah mulai dilakukan oleh BPBD Kabupaten Majalengka dikarenakan ruang lingkup BPBD merupakan kebencanaan yang dituntut kecepatan dan kesiapsiagaan yang mana hal itu dapat diatasi oleh teknologi seperti adanya website resmi serta akun resmi BPBD di berbagai media sosial yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat melakukan pelaporan kebencanaan sehingga BPBD Kabupaten Majalengka dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas. Penting juga untuk terus melakukan pembekalan dan pelatihan SDM karena mengingat SDM yang berada di BPBD Kabupaten Majalengka berasal dari latar belakang yang berbeda dan perlu adanya pengembangan tentang keamanan dan keselamatan public melalui pembekalan dan pelatihan terutama tentang kebencanaan sehingga semua unsur dalam BPBD Kabupaten Majalengka dapat lebih memahami dan lebih siap menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan-hambatan BPBD Kabupaten Majalengka dalam penanggulangan bencana tanah longsor yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki BPBD Kabupaten Majalengka, sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Majalengka tidak sedikit jumlahnya yang mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan dan berat bahkan hingga tidak dapat digunakan kembali. Beberapa sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan ringan bahkan masih tetap digunakan. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Majalengka juga masih terbilang pasif dan kurangnya kesadaran potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya sehingga menyikapi hal tersebut BPBD Kabupaten Majalengka berupaya untuk meningkatkan kapasitas relawan kebencanaan sehingga dapat juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Peningkatan kapasitas relawan yang BPBD Kabupaten Majalengka dilakukan terhadap relawan kebencanaan sejak usia dini yaitu usia sekolah mulai dari pelajar SD, SMP dan SMA sederajat. Program BPBD Kabupaten Majalengka tersebut dinamakan program Sahabat Tangguh Bencana. Perwakilan dari setiap sekolah SD, SMP, SMA dan sederajat di wilayah Kabupaten Majalengka akan diberikan sosialisasi, simulasi dan demonstrasi terkait pemahaman kebencanaan, dampak bencana dan hal apa yang perlu dilakukan apabila terjadinya bencana. Sehingga hal yang berkaitan dengan kebencanaan serta pengurangan risiko bencana dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif telah ditanamkan sejak usia dini.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kinerja BPBD Kabupaten Majalengka sudah optimal serta secara keseluruhan sudah sangat baik. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana. Namun masih ditemukan beberapa Hambatan seperti sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan banyak yang dalam keadaan rusak, kurangnya personil BPBD Kabupaten Majalengka, penanggulangan bencana di Kabupaten Majalengka lebih berfokus pada saat dan pasca bencana sehingga mitigasi bencana belum optimal dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di lingkungannya. Upaya BPBD dalam meningkatkan kinerjanya antara lain: Peningkatan kuantitas dan kualitas personil BPBD Kabupaten Majalengka, Peningkatan jumlah dan kapasitas relawan kebencanaan, Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Program Sahabat Tangguh Bencana, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, pengurangan potensi dan risiko bencana, perencanaan dan pengusulan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan pelayanan tanggap darurat. Penanggulangan bencana merupakan kewajiban semua pihak dan perlu adanya kesadaran kolektif dalam pelaksanaannya sehingga dampak yang terjadi dapat lebih diminimalisir. Oleh sebab itu, selain peningkatan kinerja BPBD perlu juga peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat guna meminimalisir dampak bencana yang dapat terjadi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Majalengka sehingga belum menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dalam penanggulangan bencana tanah longsor untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka. (2021). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021*.
- Bakhtiar. (2018). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2018. "Miliki 127 Gunung Api Aktif Jadikan Indonesia 'Laboratorium' Gunung Api Dunia." esdm.go.id. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/miliki-127-gunung-api-aktif-jadikan-Indonesia-laboratorium-gunung-api-dunia> (September 2, 2021).
- Larama, R. (2020). *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok*.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi

Ilmu Manajemen YKPN.

- Noor, J. (2014). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan. (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Pustaka Pelajar.
- Republika.co.id. (2022). *Kertajati dan Patimban Andalan Pertumbuhan Industri Jabar*. <https://www.republika.co.id/berita/ozgpp5415/kertajati-dan-patimban-andalan-pertumbuhan-industri-jabar>
- Simangunsong, F. (2015). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. IPDN Press.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Sitanggang, L. (2017). *Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana di Kota Medan (Studi pada kantor BPBD Kota Medan)*.
- Skempton, A.W., and Hutchinson J.N. 1969. *Stability of Natural Slopes and Embankment Foundations*. Mexico, 291335: e-of-the-Art Report. 7th Int. Conf. Soil Mech. Found. Eng.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Tempo.co. (2015). *Kabupaten Majalengka Alami 129 Bencana Selama 2015*. Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/734095/kabupaten-majalengka-alami-129-bencana-selama-2015/full&view=ok>
- VOA Indonesia. 2021. "Indonesia Masuk Daftar 35 Negara Paling Rawan Bencana Di Dunia." [voaindonesia.com. https://www.voaindonesia.com/a/Indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html](https://www.voaindonesia.com/a/Indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html) (Septrember 1, 2021).
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja* (Edisi Keli). Rajawali Pers.